



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon: 4512412

MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Penelitian dan Pengembangan bertujuan untuk memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kota Medan perlu dilakukan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Dati Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan.
6. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam suatu kelompok kerja fungsional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Pengoperasian adalah kegiatan yang meliputi uji pelaksanaan rekomendasi, evaluasi, desiminasi untuk efektifitas dan efisiensi suatu alternatif kebijakan dan/atau program yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perencanaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala masyarakat tertentu.

13. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
14. Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Kota Medan yang selanjutnya disingkat Balitbang Pemko Medan adalah komponen yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kota Medan.
15. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan yang selanjutnya disingkat Balitbang Pemerintah Kota Medan memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
17. Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian di lingkungan pemerintahan kota pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah.
18. Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi bidang pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kelitbangan Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Medan.

Pasal 3

- (1) Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
- (2) Kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penelitian;
 - b. pengembangan;
 - c. pengkajian;
 - d. penerapan;
 - e. perekayasaan;
 - f. pengoperasian;
 - g. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - h. ketatalaksanaan;
 - i. sumber daya manusia; dan
 - j. sumber daya organisasi lainnya.

- (3) Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi;
- a. pemerintahan umum;
 - b. otonomi daerah;
 - c. administrasi dan manajemen Pemerintahan Kota Medan;
 - d. kesatuan bangsa dan politik lokal;
 - e. penataan wilayah;
 - f. kependudukan dan catatan sipil;
 - g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. pengelolaan pembangunan daerah;
 - i. pengelolaan keuangan daerah;
 - j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur;
 - k. kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Medan; dan
 - l. bidang pemerintahan daerah yang lain sesuai kebutuhan dan kewenangan Pemerintahan Kota Medan.

BAB III PENGORGANISASIAN KELITBANGAN

Pasal 4

Organisasi kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan, terdiri atas:

- a. majelis pertimbangan;
- b. tim pengendali mutu;
- c. tim fasilitasi; dan
- d. tim pelaksana.

Pasal 5

- (1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, beranggotakan:
 - a. Walikota;
 - b. pejabat struktural eselon 2, eselon 3; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
- (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
- (3) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, beranggotakan:
 - a. kepala Balitbang Kota Medan;
 - b. pejabat struktural di lingkungan Balitbang Kota Medan; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
- (2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan;
 - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
- (3) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, beranggotakan:
 - a. Sekretaris Balitbang Kota Medan;
 - b. Kepala bagian litbang di lingkungan Balitbang Kota Medan;
 - c. pejabat struktural eselon IV di lingkungan Balitbang Kota Medan; dan
 - d. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
 - c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
 - d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kota;
 - e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Balitbang Kota Medan.
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, beranggotakan:
 - a. pejabat fungsional peneliti/perekayasa;
 - b. pejabat struktural; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Balitbang Kota Medan.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

TAHAPAN KEGIATAN KELITBANGAN

Pasal 9

Kelitbangan dilaksanakan secara bertahap dimulai dari penyusunan kerangka acuan kerja (*Term of Reference/ToR*), penyusunan usulan penelitian (proposal) dan laporan akhir.

Pasal 10

Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis dalam Lampiran Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Kegiatan utama kelitbangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada Tim Pengendali Mutu dalam bentuk laporan akhir dan ringkasan eksekutif.
- (2) Laporan kegiatan utama kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Balitbang kepada Walikota dengan tembusan kepada pejabat eselon II dan eselon III yang terkait di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

BAB V DATABASE

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan pemerintahan daerah harus didokumentasikan dalam database.
- (2) Database kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy.

Pasal 13

Database kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai dasar penyusunan rencana program kerja Kelitbangan.

BAB VI SUMBER DAYA KELITBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Sumber Daya manusia kelitbangan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. peneliti;
- b. perekayasa; dan
- c. tenaga lainnya.

Bagian Kedua Peneliti

Pasal 15

Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a) terdiri dari:

- a. pejabat fungsional peneliti yang berada pada Badan kelitbangan Pemerintah Kota Medan; dan
- b. pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh kepala Badan kelitbangan.

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan kelitbangan peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat melibatkan:

- a. pejabat fungsional peneliti;
- b. akademisi;
- c. lembaga kajian swasta; dan/atau
- d. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.

Bagian Ketiga Perekayasa

Pasal 17

- (1) Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (b) dijabat oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Penetapan Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berada pada komponen sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berada pada SKPD kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Balitbang.

Pasal 19

- (1) Dalam menjalankan tugas kerekayasaan di daerah, dibentuk tim fungsional kerekayasaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang perekayasa yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani pimpinan SKPD.
- (2) Dalam hal tugas kerekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerlukan keahlian khusus, tim fungsional kerekayasaan dapat melibatkan:
 - a. pejabat fungsional peneliti dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - b. akademisi;
 - c. lembaga kajian swasta; dan/atau
 - d. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
- (3) Tim fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah tugas kerekayasaan selesai.

Pasal 20

- (1) Susunan keanggotaan tim fungsional kerekayasaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari kepala program dan anggota.
- (2) Komponen yang akan melakukan kerekayasaan di daerah dapat membentuk tim fungsional kerekayasaan yang bertanggung jawab kepada pimpinan SKPD yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan Tim fungsional kerekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan proses tugas kerekayasaan.

Bagian Keempat Tenaga Lainnya

Pasal 21

Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, di daerah terdiri dari:

- a. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di Balitbang;
- b. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus selain peneliti dan perekayasa di Balitbang;
- c. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional umum di Balitbang; dan
- d. pegawai tidak tetap sesuai kebutuhan di Balitbang.

Bagian Kelima
Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelitbangan

Pasal 22

Penetapan formasi dan rekrutmen sumber daya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan pembinaan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. pendidikan jenjang akademis;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi komparasi;
 - d. magang;
 - e. seminar; dan
 - f. lokakarya.
- (3) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mutasi dan/atau promosi dari jabatan fungsional ke jabatan struktural atau sebaliknya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sarana Prasarana Kelitbangan

Pasal 24

- (1) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan Pemerintah Daerah antara lain:
 - a. gedung/ruang kerja;
 - b. laboratorium data;
 - c. perpustakaan;
 - d. basis data;
 - e. media cetak/elektronik;
 - f. teknologi informasi; dan
 - g. fasilitas operasional transportasi.
- (2) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kualitas hasil kelitbangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Kode Etik Peneliti dan Perekayasa

Pasal 25

Kode etik peneliti dan penelitian di daerah diatur lebih lanjut oleh organisasi profesi peneliti.

Pasal 26

Kode etik perekayasa dan kerekayasa di daerah diatur lebih lanjut oleh organisasi profesi perekayasa.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Balitbang dapat bekerja sama dengan lembaga litbang, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan kelitbangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII HASIL KELITBANGAN

Bagian Kesatu Hasil Kelitbangan

Pasal 28

- (1) Hasil kelitbangan Pemerintah Daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hasil kelitbangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi bahan rekomendasi kepada SKPD.

Bagian Kedua Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pasal 29

- (1) Hasil kelitbangan berupa inovasi, invensi, dan/atau bentuk lainnya difasilitasi oleh Balitbang untuk mendapatkan HAKI sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) HAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimiliki oleh Balitbang.
- (3) HAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan oleh Balitbang.

Bagian Ketiga Publikasi

Pasal 30

Hasil kelitbangan di daerah dilakukan oleh Balitbang.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 31

Walikota melalui Balitbang melakukan pembinaan kelitbangan di lingkungan Pemerintahan Kota Medan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Pemerintahan Kota Medan dari:

- a. APBN;

- b. APBD; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 April 2012

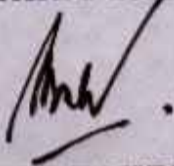
WALIKOTA MEDAN,

ttd

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM.

Diundangkan di Medan
pada tanggal 3 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA,



Ir. SYAIFUL BAHRI
NIP.19591108 199203 1 004

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 19

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN**

**TAHAPAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN**

Adapun tahapan kegiatan penelitian dan pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan adalah sebagai berikut:

I. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Adapun kerangka acuan atau ToR dibuat dan disiapkan oleh institusi/lembaga, untuk selanjutnya direspons dalam bentuk usulan penelitian/kelitbangan (Proposal). Usulan penelitian/kelitbangan ini perlu dinilai kembali oleh tim pengendali mutu. Kerangka Acuan harus diuraikan dengan jelas dan lengkap yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Judul;
- b. Latar Belakang;
- c. Pokok Permasalahan;
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Ruang Lingkup dan Kerangka Pemikiran;
- f. Metode Penelitian;
- g. Jadwal Pelaksanaan;
- h. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
- i. Daftar Pustaka.

a. Judul Penelitian

Tuliskan Judul Penelitian. Judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi gambaran mengenai penelitian yang diusulkan. Jika judul terlalu panjang dapat dibuat sub judul.

Contoh:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan

b. Latar Belakang

- Latar belakang menguraikan argumentasi tentang pentingnya penelitian perlu dilakukan. Dalam latar belakang secara tersurat harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian, yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.
- Secara operasional permasalahan penelitian yang dimaksud gayut (relevan) dengan rumusan masalah dan atau pertanyaan penelitian yang diajukan. Pokok isi uraian latar belakang masalah hendaknya mampu meyakinkan pihak lain, bahwa penelitian yang akan dilakukan memang urgen untuk dilaksanakan.
- Di sini biasanya dikemukakan analisis kesenjangan, yakni membandingkan apa yang seharusnya dengan apa yang ada. Semua argumentasi perlu didasarkan pada pijakan yang kokoh (based on data). Dalam hal ini dapat berupa kutipan-kutipan referensi, data sekunder, maupun data primer (misal hasil prasurevei).

Contoh:

Penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat mengacu peningkatan aktivitas perekonomian nasional dan percepatan terwujudnya peningkatan

kesejahteraan seluruh masyarakat. Penerapan otonomi daerah yang digariskan dalam UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah salah satu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan antara daerah secara proporsional, adil, demokratis dan transparan.

Sudah barang tentu, reformasi pola pemerintahan ini diharapkan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi, meskipun hal ini jelas melibatkan proses yang berjangka waktu lama. Dengan mendekatkan pengambilan keputusan ke masyarakat, perumusan strategi dan langkah-langkah pembangunan diharapkan lebih responsif menangkap kebutuhan ataupun isu yang berkembang. Bahkan, dengan perspektif yang lebih demokratis tersebut, diharapkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dan manfaatnya dirasakan lebih langsung oleh seluruh masyarakat.

Berbagai masalah yang dihadapi pemerintah kota dalam masa transisi seperti ini, tentu juga yang dialami oleh daerah-daerah otonomi lainnya. Untuk menjawab permasalahan yang terjadi hampir disemua, pemerintah kota telah membuat langkah-langkah dan strategi untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul dari pelaksanaan otonomi daerah ini. Pembangunan dan peningkatan di segala juga diupayakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, dan salah satu pembangunan yang terus dipacu adalah pembangunan ekonomi.

c. Pokok Permasalahan

- Akhir dari latar belakang masalah dirumuskan masalah penelitian dan atau pertanyaan penelitian secara eksplisit, jelas, dan ringkas. Pada umumnya rumusan masalah disajikan secara terpisah dari latar belakang masalah dalam kalimat pertanyaan. Dalam kegiatan penelitian, rumusan masalah dan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian mempunyai peranan penting. Dengan rumusan masalah inilah akan dapat diketahui pokok permasalahan yang akan dipecahkan melalui kegiatan penelitian.
- Rumuskan dengan jelas dan tajam permasalahan yang ingin diteliti. Uraian perumusan masalah pada umumnya dalam bentuk pertanyaan yang mengkaitkan variabel-variabel penelitian.
- Untuk penelitian kualitatif, rumusan masalah merupakan fokus penelitian. Oleh sebab itu, heading Perumusan Masalah mungkin menjadi Fokus Penelitian. Untuk itu, gunakan heading ini sesuai dengan karakteristik penelitian.

Contoh:

Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Sumatera Utara.

d. Tujuan Penelitian

- Rumusan tujuan penelitian yang diajukan hendaknya mampu memberikan gambaran tentang apa yang akan dicapai setelah penelitian tersebut selesai dilakukan.
- Rumuskan tujuan penelitian secara operasional.
- Uraian tujuan penelitian relevan dengan rumusan masalah atau fokus penelitian.

Contoh

Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan.

e. Manfaat Penelitian

- Rumusan manfaat penelitian hendaknya mampu memberikan gambaran bahwa hasil penelitian yang akan dicapai itu memiliki kontribusi terhadap perkembangan keilmuan atau kesenian sesuai dengan lingkup bidang ilmu yang dikaji dan atau memberikan jalan keluar terhadap upaya pemecahan permasalahan kehidupan nyata, baik kehidupan dalam bidang kerja maupun masyarakat, yang memerlukan pemikiran bidang ilmu yang dikaji.
- Rumuskan manfaat penelitian secara jelas. Uraian manfaat penelitian relevan dengan rumusan masalah atau fokus penelitian dan tujuan penelitian.

Contoh:

Penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi Pemerintah Kota Medan sebagai masukan dan bahan referensi dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di era otonomi dalam pembentukan PDRB, stabilisasi inflasi dan pengangguran di Kota Medan.

f. Ruang Lingkup dan Kerangka Pemikiran

- Ruang lingkup penelitian adalah penyelenggaraan pemerintah Kota Medan

Contoh:

Ruang lingkup penelitian: Pengelolaan Keuangan Daerah

- Kerangka pemikiran suatu penelitian dibangun berdasarkan susunan logis dari dokumen-dokumen penelitian terdahulu dalam bidang masalah yang sama sehingga terintegrasi sebagai suatu kesatuan dengan memperhatikan batasan dan kendala yang berkenaan dengan situasi yang berlaku atau terjadi. Berdasarkan kerangka pemikiran, hipotesis dapat diuji dikembangkan atau dirumuskan agar dapat diperiksa/diuji secara teknik statistik apakah teori yang menjelaskan hubungan antara variabel tersebut valid atau tidak.

g. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian yang dipilih untuk digunakan, variabel yang digunakan dan data apa saja yang diperlukan untuk masing-masing variabel tersebut, sumber data, metode dan alat pengumpulan data (instrumen) yang akan digunakan, dan metode analisis data. Pendekatan penelitian dapat dipilih antara kualitatif, kuantitatif, atau gabungan. Namun demikian pernyataan tentang pendekatan yang digunakan harus sampai pada level seperti deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif, korelasional dan sejenisnya. Metode analisis data menguraikan tentang cara menganalisa data yang terkumpul, sehingga dapat dicapai tujuan penelitian atau tujuan operasional penelitian.

Contoh:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kausal.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) khususnya data tahun 2005-2007. Data utama yang diperlukan adalah semua variabel yang diteliti meliputi Produk Domestik Regional Bruto,

Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan Time Series dan Cross Section. Data Time series dari tahun 2005-2007.

3. Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menganalisis variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebagai variabel bebas sedangkan Produk Domestik Regional Bruto sebagai variabel terikat

- a. Variabel Terikat adalah Pertumbuhan Ekonomi yang diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto menurut dasar harga konstan tahun 2000.
- b. Variabel Bebas:
 - i. Pendapatan Asli Daerah (PAD terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.
 - ii. Dana Perimbangan (DP) terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi yang diteliti merupakan periode setelah penerapan otonomi daerah sejak 2004 sampai dengan tahun 2008 yakni selama 5 tahun. Dari populasi tersebut akan dipilih seluruhnya menjadi sampel penelitian dengan metode sensus. Maka jumlah sampel adalah 5 periode.

5. Model Analisis

Model yang digunakan dalam penelitian ini model regresi berganda (Multiple Regression Model) dengan rumus sebagai berikut:

$$\ln \text{PDRB}_t = \beta_0 + \beta_1 \ln \text{PAD}_t + \beta_2 \ln \text{DP}_t + \varepsilon_t$$

Dimana : $i = 1, 2, 3, \dots, 25$ $t = 1, 2, 3$

dimana: PDRB=Produk Domestik Regional Bruto

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DP = Dana Perimbangan

ε = Error term

β_0 = intercept

h. Jadwal Pelaksanaan

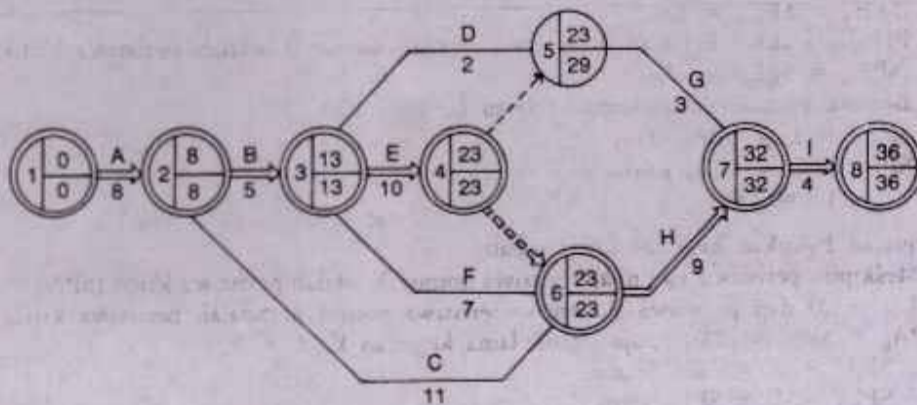
jadwal kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk Bar-Chart atau Net Work. Bar-Chart atau Net Work memberikan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadwal pelaksanaan mengacu pada Metode Penelitian.

Contoh. Bar-Chart

No	KEGIATAN	BULAN 1				BULAN 2				BULAN 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
01	Pembahasan TOR Generik oleh TIM Ahli Implementasi + Tim Manajemen	■											
02	Workshop Tor Tim ahli + PIU		■										
03	Pengumpulan Data /Informasi oleh tim Ahli Implementasi			■	■								
04	Penulisan Draft awal					■	■						
05	Presentasi Draft								■				

	laporan awal																		
06	Perbaiki Drat awal																		
07	Workshop																		
08	Finalisasi Laporan																		
09	Penyerahan Laporan																		

Contoh: Net Work



i. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Penyusunan rincian biaya pekerjaan tim perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi:

1. Gaji tenaga ahli, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;
2. Pengadaan bahan;
3. Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
4. Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.

Sedangkan metode perkiraan anggaran biaya antara lain adalah:

- a. Metode parametrik
- b. Menggunakan daftar indeks harga dan informasi proyek terdahulu
- c. Metode analisis unsur-unsur proyek
- d. Harga satuan.

a. Metode Parametrik

Metode ini amat praktis dan tepat digunakan pada waktu belum tersedia data dan informasi untuk membuat prakiraan akurat. Pendekatan yang dipakai adalah hubungan matematis antara biaya atau jam orang dengan karakteristik fisik tertentu dari obyek, seperti volume, luas, berat dan lain-lain.

Meskipun demikian, oleh karena metode ini disusun berdasarkan catatan dan pengalaman yang telah dilakukan, pemakaiannya harus memperhatikan kesesuaian proyek. Metode parametrik ini menggunakan persamaan-persamaan matematis empiris: persamaan linier dan kurva pangkat.

Contoh:

Jika kapasitas pabrik yang akan dibangun telah ditetapkan (misalnya x), dan berdasarkan data yang ada biaya per satuan kapasitas adalah a , maka biaya pembangunan pabrik (y) adalah

$$y = ax$$

b. Menggunakan Daftar Indeks

Data harga di waktu lalu dan korelasinya terhadap harga saat ini dapat ditemui dalam penerbitan berkala sebagai indeks harga,

Terdapat banyak indeks harga seperti upah tenaga kerja, bahan bangunan dan komoditi lain.

$$\text{Harga di tahun A} = \text{Harga di tahun B} \times \frac{\text{Indeks Harga di Tahun A}}{\text{Indeks Harga di Tahun B}}$$

c. Metode Analisis Unsur Proyek

Variasi lain memperkirakan biaya adalah dengan menganalisis unsur-unsurnya (elemental analysis cost estimating). Di sini lingkup proyek diuraikan menjadi unsur-unsur menurut fungsinya. Struktur yang diperoleh menjadi sedemikian rupa sehingga perbaikan secara bertahap dapat dilakukan sesuai dengan kemajuan proyek, dalam arti masukan yang berupa data dan informasi yang baru diperoleh, dapat ditampung dalam rangka meningkatkan kualitas perkiraan biaya.

Klasifikasi fungsi menurut unsur-unsurnya menghasilkan bagian atau komponen lingkup proyek yang berfungsi sama. Misalnya tiang penyangga suatu rumah tinggal dapat dibuat dari kayu, besi atau beton tetapi fungsinya adalah tetap sama sebagai tiang. Agar penggunaannya dalam perkiraan biaya efektif, maka pemilihan fungsi hendaknya didasarkan atas:

- 1) Jelas menunjukkan hubungan antara komponen - komponen proyek, dan bila telah diberi beban biaya, berarti menunjukkan komponen -komponen biaya proyek;
- 2) Dapat dibandingkan dengan komponen biaya proyek lain yang sejenis;
- 3) Mudah diukur atau diperhitungkan dan dinilai perbandingannya (rasio) terhadap data standar.

d. Harga satuan

Teknik penyusunan perkiraan biaya yang lain adalah quantity take-off, yaitu membuat perkiraan biaya dengan mengukur kuantitas komponen-komponen proyek dari gambar, spesifikasi, dan perencanaan. Untuk maksud tersebut, prosedur yang ditempuh adalah:

- 1) Klasifikasi komponen pekerjaan;
- 2) Diskripsi dari butir-butir komponen pekerjaan;
- 3) Dimensi dari butir-butir pekerjaan;
- 4) Memberi beban jam-orang;
- 5) Memberi beban biaya.

Urutan komponen-komponennya disesuaikan dengan macam proyek, misalnya untuk pembangunan gedung dimulai dari menyiapkan lahan, membuat pondasi, slope, struktur penyangga, lantai, dinding, plumbing, listrik, atap, interior, finishing dan selanjutnya. Setelah daftar quantity take-off selesai dikerjakan, kemudian memberi perkiraan jam-orang dan pembebanan biaya yang diperlukan. Pendekatan dengan teknik quantity take-off harus menunggu sampai berbagai spesifikasi dan gambar-gambar yang diperlukan tersedia, demikian pula perkiraan jam-orang dan harga-harga material yang bersangkutan.

Memperkirakan biaya berdasarkan harga satuan, dilakukan bilamana angka yang menunjukkan volume total pekerjaan belum dapat ditentukan dengan pasti, tetapi biaya per unitnya (per meter persegi, per meter kubik) telah dapat dihitung. Hal ini sering dijumpai pada pekerjaan sipil seperti membuat jalan, membangun kanal, pekerjaan tanah, memasang pipa, dan lain-lain. Praktek yang dipersiapkan disini adalah membuat paket kerja dan

memberikan beban biaya kepada paket kerja tersebut sehingga dapat diserahkan kepada pelaksana.

j. Daftar Pustaka

Daftar pustaka (berupa daftar pustaka sementara) dapat berasal dari buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dan yang telah dipublikasikan secara umum. Daftar pustaka sementara tersebut dapat dilengkapi/ditambah pada saat penulisan usulan penelitian/proposal dan laporan akhir penelitian, jika hal tersebut dianggap perlu.

II. Proposal Penelitian

Usulan penelitian/kelitbangan (Proposal) dibuat peneliti/perekayasa berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh suatu lembaga/institusi untuk bisa dipecahkan dengan segera. Usulan penelitian/kelitbangan ini harus mengacu pada perencanaan institusi tersebut yang bermaksud untuk membantu berhasilnya target yang direncanakan.

Persyaratan penting usulan penelitian/kelitbangan adalah;

- a. memiliki permasalahan yang jelas;
- b. dapat diteliti;
- c. bisa dinyatakan dalam hipotesa (bila diperlukan);
- d. memiliki kejelasan tujuan yang akan dicapai;
- e. memiliki kejelasan prosedur yang ditempuh; dan
- f. dapat dimengerti, dapat dipahami, dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Tujuan umum usulan penelitian/kelitbangan atau proposal adalah memberitahukan secara jelas tentang tujuan penelitian/kelitbangan, siapa yang hendak ditemui, serta apa yang akan dilakukan atau dicari di lokasi penelitian/kelitbangan. Proposal dibuat peneliti/perekayasa sebelum melakukan kerja lapangan sekaligus sebagai suatu pernyataan tertulis mengenai rencana/rancangan kegiatan penelitian/kelitbangan secara keseluruhan.

Dalam proposal, peneliti/perekayasa mempraktekkan bahwa mereka telah mengetahui apa yang akan mereka cari, bagaimana cara mencari dan mengenalinya, serta menjelaskan mengapa penelitian/kelitbangan itu memiliki nilai kegunaan, sehingga perlu untuk dilakukan. Usulan penelitian/kelitbangan yang baik, hendaknya mampu menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apa topik yang hendak diteliti?
- 2) Apa pertanyaan yang harus dijawab?
- 3) Apa literatur kunci yang digunakan dan sejauh mana keterbatasannya?
- 4) Apa hipotesis utama yang digunakan dalam penelitian?
- 5) Apa metodologi yang pantas digunakan?
- 6) Apakah sudah tersedia studi kasus yang dapat digunakan untuk penelitian? dan
- 7) Apa kriteria yang dipakai untuk menetapkan studi kasus tersebut?

Dalam penulisan usulan penelitian/kelitbangan juga terdapat langkah-langkah yang secara sekuen wajib diikuti, jika kita menginginkan proposal penelitian/kelitbangan yang optimal.

Beberapa langkah sekuen tersebut adalah:

- 1) Tuliskan judul yang menarik perhatian.
- 2) Buatlah ringkasan atau abstraksinya.
- 3) Tuliskan kata pengantar secara padat namun komprehensif.
- 4) Siapkan sumber-sumber kajian.
- 5) Jelaskan metode-metode yang digunakan.
- 6) Prediksikan hasil penelitiannya.

7) Diskusikan dampak potensial yang ditimbulkan dari hasil penelitian. Apabila dilihat dari segi pendekatan penelitian/kelitbangan, maka penulisan usulan penelitian/kelitbangan (Proposal) dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan Kuantitatif
Pendekatan ini didasarkan pada data atau angka-angka yang bersifat kuantitatif yang biasa dilakukan pada ilmu terapan atau eksakta. Namun bisa pula diterapkan pada penelitian sosial melalui metode non parametric.
- 2) Pendekatan Kualitatif
Pendekatan ini disusun berdasarkan fakta yang bersifat kualitatif yang umumnya terdapat pada penelitian sosial. Sehingga perlu dipelajari secara lebih seksama.

Pengajuan usulan penelitian/kelitbangan (Proposal) yang pada saatnya kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan penelitian/kelitbangan mencakup antisipasi alternatif cara-cara (metode) serta penentuan alternatif mana yang paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian/kelitbangan yang telah ditentukan. Penyusunan proposal merupakan tindak lanjut dari kerangka acuan sebagai usulan awal kelitbangan. Penyusunan proposal dilaksanakan oleh peneliti/perekayasa yang diarahkan oleh Kepala Balitbang Kota Medan sesuai dengan bidang tugasnya. Proposal harus diuraikan dengan jelas dan lengkap dengan sistematika yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- I. JUDUL PENELITIAN
- II. PENDAHULUAN
 1. Latar Belakang
 2. Perumusan Masalah/Fokus Penelitian
 3. Tujuan Penelitian
 4. Manfaat Penelitian
 5. Keluaran
 6. Keahlian yang diperlukan
 7. SKPD/Instansi Terkait
 8. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
- III. KAJIAN PUSTAKA
 1. Konsepsi
 2. Perumusan Hipotesis (Jika ada)
 3. Hubungan dengan penelitian sebelumnya
- IV. METODE PENELITIAN
 1. Jenis Penelitian
 2. Variabel-Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
 3. Populasi dan atau Sampel/Subjek Penelitian
 4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
 5. Teknik Analisis Data
- V. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
- VI. DAFTAR PUSTAKA
- VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 1. Regulasi yang relevan
 2. Studi sebelumnya
 3. Dll

JUDUL PENELITIAN

Lihat Panduan Penulisan Latar Belakang Kerangka Acuan

PENDAHULUAN

- a. Perumusan Masalah/Fokus Penelitian

- Lihat Panduan Penulisan Latar Belakang Kerangka Acuan
- b. Tujuan Penelitian
 - Lihat Panduan Penulisan Latar Belakang Kerangka Acuan
- c. Manfaat Penelitian
 - Lihat Panduan Penulisan Latar Belakang Kerangka Acuan

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Pustaka berisi kajian dan atau analisis teoretik untuk menyusun kerangka pemikiran teoretis dalam upaya pemecahan masalah penelitian dan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian serta pencapaian tujuan penelitian. Pada dasarnya kajian pustaka mencakup: (1) kajian literatur yang gayut dengan masalah dan atau fokus penelitian (review of related literature) dan (2) penyusunan kerangka kerja teoretik (theoretical framework) yang dikembangkan oleh peneliti.

Tinjauan Pustaka membahas konsepsi setiap variabel penelitian dan rumusan hipotesis. Konsepsi menguraikan definisi konseptual (hakikat) setiap variabel, analisis kritis peneliti, hingga diperoleh indikator. Indikator ini menjadi penuntun dalam pengukuran variabel setiap variabel penelitian.

1. Konsepsi

- a. Deskripsikan semua variabel yang dilibatkan dalam penelitian. Lakukan analisis kritis terhadap semua variabel penelitian sehingga diperoleh indikator.
- b. Usahakan merujuk pustaka "terbaru", relevan, dan asli (bukan mengutip dari kutipan). Untuk bidang kajian tertentu (misalnya penelitian sejarah), mungkin aspek "relevan" dapat lebih ditonjolkan daripada kemutakhiran sumber pustaka. Usahakan rujukan bersumber dari jurnal ilmiah.
- c. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan. Uraian dalam Tinjauan Pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian.
- d. Jika penelitian mengarah pada pengujian hipotesis, dalam konsepsi ini dikembangkan sejumlah argumentasi yang melandasi perumusan hipotesis.

Contoh:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2006) bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap tuntutan yang ada. Masing-masing dari ketiga komponen pokok yaitu: (1) Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi (economic maturity) di suatu negara yang bersangkutan, (2) Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, ini adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan, tetapi tidak cukup itu saja, (3) Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan

ideologi. Inovasi di bidang teknologi tanpa dibarengi inovasi social berarti potensi ada, akan tetapi input komplementernya maka hal itu tidak bisa membuahkan hasil apapun.

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) didefinisikan sebagai ekspansi kapasitas untuk memproduksi barang atau jasa dari suatu perekonomian atau ekspansi dari kemungkinan memproduksi (production possibilities) suatu perekonomian. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya, dapat dinilai melalui tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. PDRB ini adalah output yang dihasilkan dari input-input yang diperkirakan dalam harga pada suatu tahun dasar (base year) atau disebut juga PDRB pada harga konstan (constant prices).

Seperti yang dikutip dari nota keuangan RAPBN 2004/2005 yang dikatakan bahwa karena setiap daerah mempunyai ciri yang berbeda-beda baik dilihat dari potensi, luas wilayah, mata pencaharian, jumlah penduduk, maupun keadaan daerah, tentunya gambaran PDRB untuk masing-masing daerah berbeda pula. Karena itulah PDRB merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.

Salah satu teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional adalah: Teori Pertumbuhan Neoklasik yang dikembangkan oleh Solow (1970). Teori ini menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan besarnya output yang saling berinteraksi, sehingga memungkinkan adanya substitusi antara capital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian syarat-syarat adanya pertumbuhan yang mantap dalam model ini kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara modal dan tenaga kerja. Hal ini berarti adanya fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja. Teori ini juga melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri/mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Menurut teori Solow bahwa tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas perkapita meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu. Oleh sebab itu fungsi produksinya adalah: $Y = F(K, LXE)$, di mana Y adalah produk domestik bruto, K adalah persediaan modal (yang dapat mencakup modal manusia maupun fisik), L adalah tenaga kerja, dan E adalah efisiensi tenaga kerja, yang pertumbuhannya ditentukan secara eksogen. Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi: ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat. Inti dari pendekatan terhadap model kemajuan teknologi ini adalah bahwa peningkatan efisiensi tenaga kerja sejalan dengan peningkatan angkatan kerja

2. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti kekuasaan yang sebelumnya secara penuh berada di pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota. Penyerahan kewenangan ini kemudian disertai penyerahan sumber-sumber

pembiayaan (*money follows function*). Meskipun demikian ternyata ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalances*) masih juga muncul terutama terjadi antar daerah yang dianugrahi sumber daya alam yang besar dengan daerah yang miskin sumber daya alam. Karenanya pemerintah pusat masih tetap memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Umum yang besarnya sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical imbalances*) seperti masa pemerintah orde baru juga hendak dihilangkan melalui mekanisme alokasi dana Bagi Hasil Non Sumber Daya Alam dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang besarnya telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Untuk kebutuhan khusus yang tidak dapat dicukupi dengan DAU misalnya bencana alam, dana darurat maka pemerintah pusat masih memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Khusus.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004. Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian. Kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan pada saat kurang tepat mengingat hampir seluruh daerah sedang berupaya untuk melepaskan diri krisis ekonomi yang diawali pada pertengahan tahun 1997. Akibat kebijakan ini memunculkan kesiapan (fiskal) daerah yang berada satu dengan yang lain. Kebijakan ini justru dilakukan pada saat terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Saragih, 2003)

Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif (Halim, 2001)

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi kearah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang sejak lama menjadi unsur PAD yang utama (Sidik, 2002)

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian

daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardismo, 2002).

Selanjutnya dalam penjelasan UU No.32 Tahun 2004 juga dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah. Dijelaskan juga dalam UU No.32 Tahun 2004, bahwa pelaksanaan otonomi daerah memerlukan dukungan dari perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dimana hal ini salah satunya disebabkan masih rendahnya kemampuan keuangan daerah.

Pelaksanaan desentralisasi kewenangan disertai pula dengan desentralisasi pada seluruh aspek pemerintah termasuk dilakukannya desentralisasi di bidang fiskal. Desentralisasi Fiskal dilakukan melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mengatasi kesenjangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta kesenjangan horizontal antara pemerintah daerah agar terjadi pemerataan (equality) dalam kemampuan fiskal. Kesenjangan vertikal dan kesenjangan horizonlat tersebut terjadi akibat kesenjangan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan adanya perbedaan potensi antar Pemerintah daerah.

Dengan demikian tujuan kebijakan desentralisasi adalah: (a) mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, (b) peningkatan PAD dan mengurangi subsidi dari pemerintah pusat, (c) mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah (Suparmoko, 2002).

3. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Bruto merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, propinsi maupun kabupaten/kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto. Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya.

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing propinsi sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar antar Daerah.

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa. Untuk menghasilkan suatu barang atau jasa diperlukan barang lain yang disebut faktor produksi. Total

nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto.

Metode perhitungan pendapatan regional pada tahap pertama dapat dibagi dalam dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Hal ini berbeda dengan metode tidak langsung yang menggunakan data dari sumber nasional yang dialokasikan ke masing-masing daerah.

Metode langsung dapat dilakukan dengan mempergunakan tiga macam cara, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Metode tidak langsung adalah perhitungan dengan mengalokasikan pendapatan nasional menjadi pendapatan regional memakai berbagai macam indikator, antara lain jumlah produksi, jumlah penduduk, luas dan areal, sebagai alokatomya.

4. Perumusan Hipotesis (Jika ada)

- a. Jika penelitian mengarah pada pengujian hipotesis, rumuskan hipotesis penelitian. Rumusan hipotesis relevan dengan rumusan masalah.

Contoh:

Ada pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Medan.

METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian diuraikan tentang rencana kegiatan penelitian di lapangan (termasuk jenis penelitian pustaka dan laboratorium) sebagai wahana pertanggungjawaban kebenaran temuan dan hasil penelitian secara ilmiah. Dalam subbagian ini secara eksplisit perlu diuraikan seperti berikut.

1. Jenis Penelitian

- a. Jelaskan jenis penelitian. Uraikan pula rancangan penelitian yang akan dilakukan dan usahakan dilengkapi dengan gambar bagan penelitian yang akan dilakukan.
- b. Berikan argumentasi atas dasar pertimbangan apa peneliti memilih pendekatan dan jenis penelitian tersebut.

2. Variabel-Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

- a. Sebutkan semua variabel penelitian dan rumuskan definisi operasional setiap variabel tersebut.
- b. Rumusan definisi operasional merujuk pada argumentasi dan atau indikator yang telah diperoleh di Kajian Pustaka.

3. Populasi dan Sampel/Subjek Penelitian

- a. Gunakan heading ini sesuai dengan karakteristik penelitian (kuantitatif deskriptif, inferensial, atau kualitatif).
- b. Sebutkan penelitian dan teknik penarikan sampel. Gunakan rumus-rumus tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan dan relevan dengan pendekatan penelitian yang dipilih, khususnya penelitian kuantitatif berhipotesis.
- c. Untuk penelitian deskriptif dan kualitatif, uraikan teknik penentuan subjek penelitian sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

- a. Jelaskan disertai dengan argumentasi teknik pengumpulan data yang dipilih.
- b. Jelaskan jenis dan tipe instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Tiap instrumen disertai dengan argumentasi bagaimana cara pembakuan setiap instrumen yang akan digunakan.

- c. Untuk penelitian kualitatif perlu ada uraian tentang teknik pemeriksaan keabsahan data.

5. Teknik Data

Jelaskan disertai dengan argumentasi teknik analisis data yang dipilih.

PERSONALIA PENELITIAN

Format personalia penelitian sebagai berikut.

1. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : .
 - b. Golongan Pangkat dan NIP :
 - c. Jabatan Fungsional : .
 - d. Jabatan Struktural :
 - e. Unit Kerja:
 - f. Waktu untuk Penelitian ini : jam /minggu

2. Anggota Peneliti
 - a. Anggota Peneliti
 - b. Nama Lengkap dan Gelar :
 - c. Golongan Pangkat dan NIP :
 - d. Jabatan Fungsional :
 - e. Jabatan Struktural : .
 - f. SKPD : .
 - g. Waktu untuk Penelitian ini : jam /minggu

JADWAL PELAKSANAAN

Lihat Panduan Penulisan Perumusan Masalah/Fokus Penelitian pada Kerangka Acuan.

PERKIRAAN BIAYA PENELITIAN

1. Berikan rincian biaya penelitian yang mengacu pada kegiatan penelitian yang diuraikan dalam Metode Penelitian.
2. Rekapitulasi biaya penelitian:
 - a. Honorarium Peneliti
 - b. Bahan dan Peralatan Penelitian. Perjalan.
 - c. Biaya Lain-lain, yang mencakup biaya untuk seminar, laporan, dan lain-lain (sebutkan).

DAFTAR PUSTAKA

- a. Semua referensi yang dirujuk di teks dituliskan pada Daftar Pustaka dan Daftar Pustaka hanya berisi referensi yang dirujuk di teks saja.
- b. Gunakan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, kota tempat terbit, dan penerbit.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pada bagian akhir usulan penelitian/proposal berisi laporan-laporan, peraturan-peraturan yang berhubungan bidang penelitian.

III. Laporan Penelitian

Draft Laporan Akhir, disusun oleh tim pelaksana kelitbangan yang diketuai oleh ketua tim, sebagai bahan dalam forum seminar guna penyempurnaan hasil kelitbangan.

Pembahasan draft laporan akhir di lingkungan Pemerintah Daerah melibatkan tim fasilitasi dan tim pengendali mutu, pejabat struktural, peneliti/perekayasa yang terkait dalam pelaksanaan pengumpulan data lapangan dengan mengikutsertakan komponen dan/atau instansi terkait di

lingkungan Pemerintah Daerah serta pakar sesuai dengan keahlian dan kepakarannya.

Dalam proses pelaksanaan pembahasan draft laporan akhir biasanya harus disertai dengan notulensi rapat sebagai alat bukti dan dasar penyempurnaan laporan. Pembahasan Draft Laporan Akhir harus dilengkapi dengan bahan pendukung:

- a. ringkasan penelitian yang berisi: pendahuluan, permasalahan, tujuan, temuan yang mendukung penyelesaian masalah, rekomendasi; dan
- b. presentasi berupa piranti lunak untuk paparan.

Draft laporan akhir tersebut disusun dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN KULIT MUKA

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Perumusan Masalah/Fokus Penelitian

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Keluaran

F. Keahlian yang diperlukan

G. SKPD/Instansi Terkait

H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsepsi

B. Perumusan Hipotesis (Jika ada)

C. Hasil Penelitian Sebelumnya

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

B. Variabel-Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

C. Populasi dan Sampel/Subjek Penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

E. Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

B. Pengujian Persyaratan Analisis (Jika ada)

C. Pengujian Hipotesis (Jika ada)

D. Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

C. Implikasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. PERHITUNGAN-PERHITUNGAN DALAM ANALISIS DATA

B. Regulasi yang relevan

Dalam uraian berikut ini hanya dikemukakan hal-hal yang belum dijelaskan dalam teknik penyusunan kerangka acuan dan usulan penelitian/proposal.

HALAMAN KULIT MUKA

(Cukup jelas)

ABSTRAK

- a. Abstrak merupakan pemadatan dari hasil penelitian
- b. Abstrak ditulis 1 spasi, ditulis lebih kurang 200 kata.
- c. Substansi Abstrak sebagai berikut.
 - Tujuan atau pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti.
 - Metode penelitian.
 - Simpulan yang diperoleh dari penelitian.
- d. Format Abstrak Penelitian sebagai berikut.
 - Judul/identitas, ditulis dengan huruf kapital, dicetak bold, posisi center.
 - Nama peneliti atau tim peneliti (tanpa menyertakan gelar akademik dan gelar lainnya), tahun penelitian, jumlah halaman laporan penelitian, posisi center, dalam tanda kurung.
 - Heading/tulisan ABSTRAK (posisi center, huruf kapital, bold).
 - Isi abstrak (tujuan penelitian, metode, dan simpulan; masing-masing dalam satu paragraf)

KATA PENGANTAR

Cukup jelas.

DAFTAR TABEL

Cukup jelas.

DAFTAR GAMBAR

Cukup jelas.

DAFTAR LAMPIRAN

Cukup jelas.

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lihat Panduan Penulisan Latar Belakang Kerangka Acuan

B. Perumusan Masalah/Fokus Penelitian

Lihat Panduan Penulisan Perumusan Masalah/Fokus Penelitian pada Kerangka Acuan

C. Tujuan Penelitian

Lihat Panduan Penulisan Tujuan Penelitian pada Kerangka Acuan

D. Manfaat Penelitian

Lihat Panduan Penulisan Manfaat Penelitian pada Kerangka Acuan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi

Lihat Panduan Penulisan Konsepsi pada Proposal Penelitian

B. Perumusan Hipotesis (Jika ada)

Lihat Panduan Penulisan Rumusan Hipotesis pada Proposal Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Lihat Panduan Penulisan Desain Penelitian pada Proposal Penelitian

B. Variabel-Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Lihat Panduan Penulisan Variabel-Variabel Penelitian dan Definisi Operasional pada Proposal Penelitian

C. Populasi dan Sampel/Subjek Penelitian

Lihat Panduan Penulisan Populasi dan Sampel/Subjek Penelitian pada Proposal Penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Lihat Panduan Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian pada Proposal Penelitian

E. Teknik Analisis Data

Lihat Panduan Teknik Analisis Data Penelitian pada Kerangka Acuan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Deskripsi data penelitian, mencakup hasil-hasil perhitungan statistik deskriptif, seperti skor rata-rata, simpangan baku/variansi, skor minimal & maksimal, skewness, kurtosis, dan lain-lain.
2. Tabel data (tabel frekuensi), dan grafik (diagram batang atau histogram & poligon).
3. Dideskripsikan setiap variabel penelitian. Di sini dikemukakan hasilnya saja, rumus-rumus, perhitungan-perhitungan ditempatkan pada halaman lampiran.
4. Jika penelitian kualitatif, dideskripsikan data penelitian setelah dilakukan reduksi data.

B. Pengujian Persyaratan Analisis (Jika ada)

1. Beberapa teknik statistika inferensial memerlukan uji persyaratan.
2. Jika penelitian menggunakan teknik statistika tersebut, maka di sini dikemukakan uji persyaratan analisis, misal uji normalitas distribusi, homogenitas variansi, linieritas hubungan antar variabel, dan sebagainya.
3. Di sini dikemukakan hasilnya saja, perhitungan-perhitungan ditempatkan pada halaman lampiran.

C. Pengujian Hipotesis (Jika ada)

1. Jika penelitian memerlukan pengujian hipotesis, di sini dideskripsikan proses pengujian hipotesis sesuai prosedur yang baku.
2. Jika pengujian hipotesis perlu dukungan perhitungan-perhitungan, maka perhitungan-perhitungan tersebut ditempatkan pada halaman lampiran.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Di sini peneliti memberikan analisis kritis tentang temuannya dibandingkan dengan temuan-temuan yang telah dilakukan oleh para ahli terdahulu atau teori-teori yang ada, baik teori yang telah dikemukakan pada Bab II maupun teori lain yang relevan.
2. Di samping itu, peneliti juga dapat memberikan penjelasan tentang ketidak tercapainya tujuan yang diharapkan, kegagalan yang mungkin muncul dari hasil analisis, fisibilitas penerapan hasil di lapangan, dan berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan hasil analisis yang mengarah ke penarikan simpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Tuliskan simpulan yang telah dilakukan.
2. Simpulan relevan dengan keseluruhan substansi penelitian, terutama rumusan masalah.

B. Saran

1. Tuliskan saran secara operasional dan relevan dengan permasalahan, bahasan, dan temuan penelitian.

C. Implikasi Penelitian

1. Tuliskan implikasi hasil penelitian.
2. Implikasi merupakan panduan teknis bagi pihak-pihak yang akan menggunakan hasil penelitian. Oleh sebab itu, tuliskan seoperasional mungkin sehingga pengguna dapat mengaplikasikan hasil penelitian tanpa bertanya kepada peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

1. Semua referensi yang dirujuk di teks dituliskan pada Daftar Pustaka dan Daftar Pustaka hanya berisi referensi yang dirujuk di teks saja.
2. Gunakan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, kota tempat terbit, dan penerbit. Secara lebih rinci dapat dilihat pada bab tentang teknik tata tulis ilmiah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran memiliki kategori yang sama dengan bab, sehingga teknik penulisan nama lampiran sama dengan judul bab.
2. Hal-hal yang dilampirkan dalam proposal/laporan penelitian antara lain sebagai berikut.
 - a. Peraturan-Peraturan
 - b. Perhitungan-perhitungan dalam analisis data, baik untuk kepentingan uji coba maupun untuk analisis data hasil penelitian.
 - c. Instrumen-instrumen penelitian.
 - d. Transkrip hasil wawancara yang relatif panjang.
 - e. Gambar yang penting tetapi tidak disajikan dalam naskah.
 - f. Surat-surat yang berkaitan dengan penelitian, seperti surat izin, surat jawaban dari pimpinan instansi daerah yang diteliti.

IV. BAHAN DAN TATA TULIS ILMIAH KERANGKA ACUAN, PROPOSAL DAN LAPORAN KELITBANGAN

A. BAHAN

Bahan kertas dan tinta yang digunakan untuk proposal/laporan penelitian diatur sebagai berikut.

- (1) Kertas yang digunakan untuk naskah proposal/laporan penelitian adalah kertas HVS 70 gram, berwarna putih, ukuran A4 (21 x 29,74 cm), dan tinta yang digunakan adalah tinta hitam.
- (2) Kertas yang digunakan untuk tabel, gambar (termasuk foto) adalah sama untuk naskah proposal/laporan penelitian.
- (3) Sampul luar (cover) proposal/laporan penelitian berupa karton warna sesuai dengan jenis penelitian dilengkapi logo Pemko Medan warna.

B. FORMAT

Jarak pengetikan (spasi) dan ukuran huruf untuk penulisan proposal/laporan penelitian sebagai berikut.

- (1) Proposal/laporan penelitian diketik dengan jarak 1,5 (dua) spasi dan tidak bolak-balik.
- (2) Huruf yang digunakan berukuran 11 pt dan disarankan lenis huruf yang digunakan adalah Arial dan seluruh naskah proposal/laporan penelitian menggunakan jenis (tipe) huruf yang sama.
- (3) Lambang, huruf, tanda-tanda, dan gambar yang tidak dapat dikerjakan dengan komputer, dibuat/ditulis tangan dengan rapi menggunakan tinta hitam (tinta cina).
- (4) Alinea (paragraf) diketik masuk ke dalam 0,5".
Format kertas yang diketik menggunakan margin sebagai berikut:
 - (1) Margin : 4 cm
 - (2) Margin atas : 4 cm

(3) Marjin kanan : 3 cm

(4) Marjin bawah : 3 cm

C. TEKNIK TATA TULIS

1. Penomoran Halaman

Penomoran halaman pada proposal/laporan penelitian mengikuti aturan berikut.

a. Nomor halaman naskah proposal/laporan penelitian diketik dengan angka arab, di sudut kanan atas (1,2"/3 cm dari kanan dan 1,0"/2,5 cm dari atas).

b. Setiap bab dimulai dengan halaman baru, nomor halamannya diketik di tengah-tengah bagian bawah.

c. Bagian awal naskah proposal/laporan penelitian diberi halaman dengan angka romawi kecil, di tengah-tengah bagian bawah. Halaman judul dalam tidak perlu diberi halaman, tetapi nomor urutan halamannya diperhitungkan.

d. Pengetikan nomor halaman tidak dibenarkan diberi tanda apapun, cukup angka/nomor halaman yang dimaksud.

2. Penulisan Tabel, Gambar, dan Semacamnya

Penulisan tabel, gambar, grafik, atau lainnya mengikuti aturan berikut.

a. Lebar tabel, gambar harus sama dengan lebar halaman sesuai dengan format ketikan.

b. Judul tabel diketik di atas tabel, nomor tabel digunakan angka arab. Apabila dalam naskah proposal/laporan penelitian yang ditulis tersebut cukup banyak tabel (lebih dari lima tabel) di setiap bab, penomoran tabel dibuat sesuai dengan bab, misalnya tabel pada Bab I diberi nomor Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan tabel pada Bab II diberi nomor Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan seterusnya.

c. Judul/nama gambar, grafik, dan nomornya diketik di bawah gambar/grafik. Penomoran gambar dan grafik sama dengan penomoran tabel.

3. Penggunaan Huruf

Penggunaan huruf dalam proposal/laporan penelitian diatur sebagai berikut.

a. Judul bab dituliskan secara simetris dengan huruf kapital seluruhnya. Misalnya, kata bab I ditulis pada baris pertama, sedangkan pendahuluan ditulis pada baris di bawahnya.

b. Judul subbab (A, B, C, dst.) diketik mulai dari tepi (margin) kiri, dan sub-subbab menyesuaikan, karena setiap pemecahan isi subbab ke sub-subbab tidak sama. Judul ini ditulis dengan huruf kapital hanya pada bagian awal masing-masing kata, kecuali pada kata-kata tugas atau kata-kata sambung, seperti dan, untuk, bagi, dituliskan dengan huruf kecil semua.

Bab I

Subab A.

Sub-subbab 1.

Bagian dari heading 1. a.

Bagian dari heading a. 1)

Bagian dari heading 1) a)

Bagian dari heading a) (1)

Bagian dari heading (1) (a)

Bagian dari heading (a) i)

Pasangan dari heading i) ii)

Pasangan dari heading (a) (b)

Pasangan dari heading (1) (2)

Pasangan dari heading a) b)

Pasangan dari heading 1) 2)

Pasangan dari heading a. b.

Pasangan dari heading 1. 2.

Pasangan dari heading A. B.

Pasangan dari heading I. II

4. Penulisan Daftar Pustaka

Daftar pustaka hanya mencantumkan sumber yang dirujuk dalam teks saja. Sebaliknya, referensi yang dirujuk dalam teks harus dicantumkan pada daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka dimulai pada tepi kiri, dan bila lebih dari satu baris, baris kedua hanging 0,5" Daftar pustaka ditulis dalam spasi tunggal, dan antar pustaka satu dengan yang lainnya diberi jarak $\frac{1}{2}$ spasi (spacing after paragraph 3 pt). Dituliskanurut abjad (ascending). Tata cara penulisan daftar pustaka secara umum sebagai berikut.

a. Buku penulis tunggal

- 1) Disajikan dalam urutan penulisan: nama penulis (diketik dengan mendahulukan nama marga atau second name/last name).
- 2) Untuk nama orang Indonesia yang tidak bermarga, jika nama terdiri atas dua suku kata harus juga dibalik.
- 3) Nama penulis Cina diketik seperti apa adanya (tidak dibalik).
- 4) Gelar kesarjanaan penulis buku tidak disertakan.
- 5) Setelah nama, dituliskan: tahun penerbitan, judul buku (diketik italic), kota penerbit, dan nama penerbit.
- 6) Penulisan judul dengan huruf kapital di awal judul sumber pustaka.
- 7) Antara nama, tahun, judul, dan kota terbit diberi batas berupa tanda kurung dan titik (...).
- 8) Antara Kota terbit dan penerbit diberi tanda batas titik dua (:).
- 9) Setelah penerbit, diakhiri dengan tanda titik (.).
- 10) Penulisan semua tanda baca melekat pada huruf terakhir dan setelah itu diberi sela satu ketukan.

Contoh sebagai berikut.

Nunnally, J. C. (2008). *Psychometric Theory*. New York: McGraw-Hill, Inc.

Santoso, S. I. (1987). *Pendidikan di Indonesia (dari masa ke masa)*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

b. Buku dengan dua orang penulis atau lebih

Semua nama penulis, ditulis lengkap. Contoh sebagai berikut.

Ktafs, C.E. and Arnhiem, D. D. (1981). *Modern Principles of Athletic Training*. St. Louis: The Cv. Mosby Co.

Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hobson, C. J. McPortland, J., Mood, A. M., Weins Field, E. D. & Yoek, R. L. (2006). *Equality of Educational Opportunity*. Washington, DC.: Government Printing Office.

c. Buku kumpulan tulisan dengan editor

Ditulis dengan urutan: nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan (dalam tanda petik), nama editor, judul buku (diketik miring), nomor halaman, kota penerbit, dan nama penerbit. Contoh sebagai berikut.

Burton, J. K. and Merrill, P. F. (1977). "Need assesment: Goals, needs, and priorities". In Leslie J. Briggs (Ed). *Instructional Design: Principles and Application*, 24-46. New Jersey: Educational Technology.

d. Dua buku atau lebih dengan seorang penulis dan tahun penerbitan sama

Gordon, W. J. J. and Proze, T. (2011a). *The Art of The Possible*. Cambridge: Porpoise Books.

Gordon, W. J. J. and Proze, T. (2011b). *The Basic Course In Sinectics*. Cambridge: Porpoise Books.

- Gordon, W. J. J. and Proze, T. (2011c). *Facis and quesses*. Cambridge: Porpoise Books.
- e. Buku dengan editor
 Guetzknow, H. and Valdes, J. J. (Eds). (1966). *Simulated International Processes: Theories And Research In Global Modelling*. Beverly Hill, California: Sage Publications.
- f. Dua buku atau lebih dengan pengarang yang sama dan tahun terbit yang berbeda.
 Semua pustaka ditulis dengan lengkap dengan cara seperti yang telah diuraikan, dengan catatan buku terbitan tahun yang paling akhir dinomorsatukan, diikuti oleh buku tahun penerbitan berikutnya.
 Berk, R. A. (1988). *Selecting Index or Reliability*. In r. A. Berk (ed)., *A Guide To Criterion-Referenced Test Construction*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 231-266.
 Berk, R.A. (1988). *Conducting The Item Analysis*. In R.A. Berk, *A Guide To Criterion-Referenced Test Construction*, 77-143. Berk, R. A. 1988.
- g. Buku terbitan lembaga dan tanpa pengarang
 Contoh sebagai berikut.
 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi [Ditjen Dikti]. (1990). *Kurikulum pendidikan MIPA LPTK program Strata-1 (S1)*. Jakarta: Depdikbud.
 Di dalam teks, "...Menurut Ditjen Dikti (2011)..... ". Atau "... (Ditjen Dikti, 1990)."
- h. Terjemahan
 Cara menulisnya sama dengan cara menulis pustaka lain, kecuali judul buku diganti dengan judul yang sudah diterjemahkan. Di belakang judul tersebut dituliskan nama penerjemah, yang diawali dengan nama kecilnya, dan di belakang dituliskan kata penerjemah. Contoh sebagai berikut.
 Gagne, R. M., Briggs, L. J. & Wager, W. W. (1988). *Prinsip-prinsip Desain Instruksional*, (3rd. ed.) (Penerjemah Soeparman Kardi). Chicago: Holt, Rinehart, and Winston.
 Luria A. R. (1969). *The Mind of A Mnemonist* (L. Solotaroff, Trans.). New York: Avon Bookss. (Original work published 1965).
- i. Jurnal dan atau majalah ilmiah
 Ditulis dengan urutan: nama penulis, tahun penerbitan jurnal, judul artikel (diketik di antara tanda petik), nama jurnal/majalah ilmiah (diketik miring) lengkap dengan nomor, volume dan bulan, tahun penerbitan, dan nomor halaman artikel itu dimuat. Contoh sebagai berikut.
 Paquette, J. E. (1991). "Minority Participation in Secondary Education: A graned descriptive methodology". *Educational Evaluation and Policy Analysis*. Vol. 3 No. 2 Summer 2011. pp. 139 - 157.
 Bredderman, T. (1983). "Effect of Activity-Based Elementary Science on Student Outcomes: A Quantitative Synthesis". *Review of Educational Research*. Vol. 53 No. 4, pp. 5-12.
 Pavio, A. (1975). "Perceptual Comparison Through The Mind's Eye." *Memory & Cognition*. 3, 635-647.
 Speetch, M L., & Wilkie, D. M. (1983). "Subjective Shortening: Model Of Pigeon" *Memory For Event Duration*". *Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes*, 9, 14-30.
 Horowitz, L. M., Post, D. L., Frech, R., S., Walls, K. D., & Siegelman, E. Y. (1981). "The Prototype As A Construct In Abnormal Psychology: Clarifying Disagreement In Psychiatric Judgments". *Journal of Abnormal Psychology*, 90, 575-585.

- j. Skripsi, tesis, disertasi
- Sri Rejeki. 1999. "Peningkatan Kualitas Belajar Mengajar Sejarah SMU Melalui Model Pembelajaran Diskusi". Tesis Magister Pendidikan Sejarah tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Baker, R. G. 1981. "The Contribution of Coaching to Transfer of Training: An Extention Study". Unpublish Doctoral Dissertation. University of Oregon.
- Sunarto. 1984. "Pengembangan Model Pengukuran Produktivitas Perguruan Tinggi di Indonesia". Disertasi Doktor tidak dipublikasikan. IKIP Yogyakarta.
- k. Makalah
- Cara menulis makalah yang disajikan pada forum ilmiah tertentu pada dasarnya sama dengan cara menulis acuan yang berbentuk disertasi, tesis, dan skripsi.
- Kardi, S. 2004. "Pelaksanaan dan Pengembangan Kurikulum Peguruan Tinggi " Makalah disajikan pada Seminar Lokakarya Pendidikan Tinggi se-Sumatera Utara di USU Medan.
- l. Artikel pada surat kabar
- Surat kabar, atau artikel dalam surat kabar, pada umumnya tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Sebagai penggantinya, teks diberi catatan, misalnya (Jawa Pos, 1 Januari, 1993, halaman 1 kolom 4-5).
- m. Karya individual dari internet
- Nama penulis ditulis seperti pada bahan cetak diikuti dengan tahun, judul dengan diberi keterangan dalam kurung (Online), alamat sumber dan tanggal mengakses dalam tanda kurung. Agar pembaca dapat melacak dengan Pemulah. Judul ditulis dengan cetak miring. Alamat dicetak miring dan underline. Contoh sebagai berikut.
- Moynihan, J. F., Kettle P., & Murray A. (1998). High Performance Control Of Ac Servomotor Using An Integrated Dsp: Motion Control Group, Analog Device. (Online) (<http://www.analog.com>, diakses 8 Setember 2011).
- n. Artikel dari Jurnal yang diakses dari Internet
- Secara berurutan cara menulisnya sebagai berikut: Nama pengarang artikel, tahun, judul artikel dalam tanda petik, nama majalah/jurnal yang lain dicetak miring dan diberi keterangan dalam kurung (Online), nomor, volume penerbitan, dan diakhiri dengan dengan alamat sumber dan keterangan kapan diakses diantara tanda kurung. Alamat dicetak miring dan underline. Contoh sebagai berikut.
- Chen, Yung-Yuan. (2005). "Concurrent Detection of Control Flow Errors by Hybrid Signature Monitorin," IEEE Transactions on Computers (Online). Vol. 54, No.10, (<http://csdl2.computer.org>, diakses 5 September 2011).
- o. E-mail yang diakses dari Internet
- Nama pengirim ditulis diikuti keterangan dalam kurung alamat E-mail pengirim, kemudian dituiskan tanggal, bulan, tahun, topik bahan dengan cetak miring, diakhiri dengan nama yang dikirim disertai alamat E-mail yang dikirim dalam tanda kurung. Alamat dicetak miring dan underline. Contoh sebagai berikut.
- Davis, A. (a.davis@uwt.edu.au). 20 April 2011. Leaming to use authoring tools. Email kepada Alison Hunter (huntera@usq.edu.au).

FORMAT PENILAIAN KERANGKA ACUAN

**LEMBAR PENILAIAN KERANGKA KERJA
DI LINGKUNGAN PEMKO MEDAN**

(Diisi Oleh Tim Pengendali Mutu)

Ketua Tim :
 Anggota Tim :
 Judul Penelitian :

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	2	3	4	5	(4*5)
1	Latar belakang dan perumusan masalah	<ul style="list-style-type: none"> Ketajaman penyusunan latar belakang dan perumusan masalah 	30		
2	Manfaat hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi hasil penelitian pada pengembangan ipteks, pembangunan kota dan atau pengembangan kelembagaan 	20		
3	Ruang Lingkup dan Kerangka Pemikiran	<ul style="list-style-type: none"> Kejelasan konstruk variabel penelitian (deskripsi teoretik setiap variabel hingga diperoleh indikator). Relevansi, kemutakhiran, keaslian referensi dan rujukan Keselarasan dengan regulasi 	20		
4	Metode penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan desain penelitian dengan masalah yang akan diungkap. Ketepatan teknik pengambilan Sampel/ Subjek penelitian. Kualitas instrumen (ketepatan jenis instrumen, validitas, dan reliabilitas instrumen atau pemeriksaan keabsahan data) Ketepatan teknik analisis data. 	20		
5	Kelayakan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian jadwal, kesesuaian keahlian personalia, dan kewajaran biaya 	10		
Jumlah			100		

Catatan

Skor : 1, 2, 3, 4, 5 (1=tidak layak, 2=sangat kurang, 3=kurang, 4=baik, 5=sangat baik)

Nilai :Bobot x Skor

Batas Penerimaan (passing grade)=350

Coret yang tidak perlu

Medan,
Ketua Tim,

(.....)

FORMAT PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN
LEMBAR PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN PEMKO MEDAN
(Diisi Oleh Tim Pengendali Mutu)

Ketua Tim :
Anggota Tim :
Judul Penelitian :

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	2	3	4	5	(4*5)
1	Latar belakang dan perumusan masalah	<ul style="list-style-type: none"> Ketajaman penyusunan latar belakang dan perumusan masalah 	30		
2	Manfaat hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi hasil penelitian pada pengembangan ipteks, pembangunan kota dan atau pengembangan kelembagaan 	20		
3	Tinjauan pustaka	<ul style="list-style-type: none"> Kejelasan konstruk variabel penelitian (deskripsi teoretik setiap variabel hingga diperoleh indikator). Relevansi, kemutakhiran, keaslian referensi dan rujukan Keselarasan dengan regulasi 	10		
4	Metode penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan desain penelitian dengan masalah yang akan diungkap. Ketepatan teknik pengambilan Sampel/ Subjek penelitian. Kualitas instrumen (ketepatan jenis instrumen, validitas, dan reliabilitas instrumen atau pemeriksaan keabsahan data) Ketepatan teknik analisis data. 	20		
5	Kelayakan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian jadwal, kesesuaian keahlian personalia, dan kewajaran biaya 	10		
6	Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> Orisinalitas, tata tulis ilmiah termasuk penyusunan daftar pustaka, sistematika proposal, dan kualitas bahasa yang digunakan. 	10		
Jumlah			100		

Catatan

Skor : 1, 2, 3, 4, 5 (1=tidak layak, 2=sangat kurang, 3=kurang, 4=baik, 5=sangat baik)

Nilai :Bobot x Skor

Batas Penerimaan (passing grade)=350

Coret yang tidak perlu

Medan,

Ketua Tim

(.....)

FORMAT PENILAIAN LAPORAN PENELITIAN
LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN PEMKO MEDAN
(Diisi Oleh Tim Pengendali Mutu)

Ketua Tim :
Anggota Tim :
Judul Penelitian :

NO	KOMPONEN BOBOT SKOR NILAI	BOBOT	SKOR	NILAI
I	PENDAHULUAN	(10)		
	1. Latar belakang dan perumusan masalah	5		
	2. Rumusan tujuan dan manfaat penelitian	5		
II	TINJAUAN PUSTAKA	(20)		
	1. Kejelasan konstruk variabel penelitian (deskripsi teoretik setiap variabel hingga diperoleh indikator)	10		
	2. Relevansi, kemutakhiran, keaslian referensi dan rujukan berupa jurnal ilmiah	10		
III	METODE PENELITIAN	(20)		
	1. Ketepatan desain penelitian Dengan masalah yang akan diungkap.	5		
	2. Ketepatan teknik pengambilan Sampel/ Subjek penelitian.	5		
	3. Kualitas instrumen (ketepatan jenis instrumen, validitas, dan reliabilitas instrumen atau pemeriksaan keabsahan data)	5		
	4. Ketepatan teknik analisis	5		
IV	HASIL PENELITIAN	(30)		
	1. Teknik dan kualitas deskripsi hasil penelitian (deskripsi data, uji asumsi & hipotesis, pembahasan).	10		
	2. Kualitas simpulan, saran, dan implikasi hasil penelitian	10		
	3. Kontribusi hasil penelitian pada pengembangan Ipteks, pemecahan masalah pembangunan, dan atau pengembangan kelembagaan/ institusi	10		
V	UMUM	(20)		
	1. Orisinalitas penelitian	5		
	2. Rumusan abstrak	5		
	3. Kesesuaian dengan format dan teknik tata tulis ilmiah.	5		
	4. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar (EYD).	5		

Catatan

Skor : 1, 2, 3, 4, 5 (1=tidak layak, 2=sangat kurang, 3=kurang, 4=baik, 5=sangat baik)

Nilai : Bobot x Skor

Batas Penerimaan (passing grade)=350

Coret yang tidak perlu

Medan,
Ketua Tim ,

(.....)

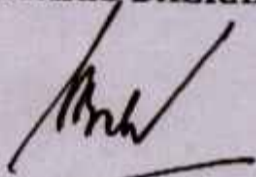
Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 April 2012

WALIKOTA MEDAN,

ttd

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KOTA,



Ir. SYAIFUL BAHRI
NIP.19591108 199203 1 004